

**STRATEGI DINAS KEBERSIHAN DAN  
PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KOTA BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH:**

**MUHAMMAD HAKIKI**

**97346/2009**

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bukittinggi.

Nama : Muhammad Hakiki  
TM/NIM : 2009/97346  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Juni 2014

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dra. Hj. Jumiati, M.Si  
NIP. 19621109 198602 2 001

Pembimbing II



Nora Eka Putri, S.IP, M.Si  
NIP. 19850312 200812 2 006

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

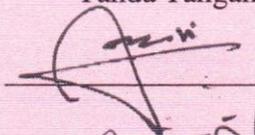
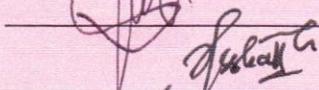
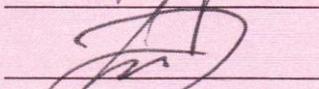
Pada Hari Kamis Tanggal 5 Juni 2014, pukul 10.00 s/d 11.10 WIB

### Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bukittinggi

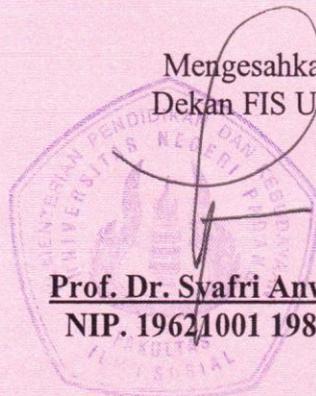
Nama : Muhammad Hakiki  
TM/NIM : 2009/97346  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 Juni 2014

#### Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Hj. Jumiati, M.Si.	
Sekretaris	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si.	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D.	
Anggota	: Siska Sasmita, S.IP, MPA.	
Anggota	: Zikri Alhadi S.IP. M.A.	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.**  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hakiki  
TM/NIM : 2009/97346  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bukittinggi**" adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 8 Juni 2014  
Saya yang menyatakan



**Muhammad Hakiki**  
97346/2009

## ABSTRAK

### **Muhammad Hakiki 97346/2009: Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah pencemaran lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi. Pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi masih menggunakan sistem *Open Dumping*, yaitu meletakkan sampah pada ruang terbuka. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui upaya awal yang ditempuh dalam mengatasi kendala pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian dilakukan secara *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Bukittinggi, adalah pelaksanaan tempat pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi sampah dari sumber timbulnya sampah dengan memanfaatkan masyarakat agar dapat mengolah/mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Kendala yang ditemui dalam strategi pengelolaan sampah yaitu kurangnya komunikasi antara aparat pelaksana serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan sampah 3R tersebut. Untuk mencari jalan keluar agar strategi ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang, dibutuhkan semacam koordinasi yang intensif antara aparat terkait agar terjalin suatu komunikasi yang baik, begitupun dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendasar kepada masyarakat untuk memacu dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi telah terlaksana tetapi belum optimal. Untuk keberhasilan strategi ini, sebaiknya pemerintah dapat memperkuat regulasi atau landasan hukum untuk mendukung upaya pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada suri tauladan kita dan manusia termulia Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata 1 (S1) dengan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang berkenan memberikan izin penelitian ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Dr. Hasrul, M.Si sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir.

4. Ibu Dra. Hj. Jumiati, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, dan memberi masukan serta motivator bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D, Ibu Siska Sasmita, S.IP, MPA dan Zikri Alhadi S.IP. MA selaku penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Supadria, M.Si selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi.
8. Ibu Zulhelmi, SH. Selaku Bidang Penyuluhan dan Sanitasi yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dani Suryati SSPT, M.Si dan Bapak Kastirtono selaku Staf Bidang Penyuluhan yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
10. Bapak Mihandrik, SSTP, M.Si selaku Lurah Pulau Anak Air Kota Bukittinggi yang telah memberikan izin penelitian di kelurahan Pulau Nak Aia dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
11. Ibu Desy selaku Fasilitator serta Ketua Kelompok Dasawisma Sedap Malam dan Ibu Rani Silfia selaku anggota yang telah bersedia

memberikan informasi dan meluangkan waktu untuk diwawancarai mengenai pengelolaan sampah dengan daur ulang.

12. Serta masyarakat kota Bukittinggi yang telah bersedia memberikan informasi mengenai penelitian ini.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, serta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a khususnya, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan do'a, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyempurnakan skripsi ini, namun masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Ilmu Pengetahuan yang penulis miliki. Meski begitu, penulis tetap berharap bahwa karya ini bisa menjadi banyak manfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padang, 17 April 2014

Penulis  
Muhammad Hakiki

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teoritis .....	11
B. Kerangka Konseptual .....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Informan Penelitian .....	37
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	38
E. Jenis dan Sumber Data .....	40
F. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	41

G. Teknik Analisis Data .....	41
-------------------------------	----

**BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	44
----------------------	----

B. Temuan Khusus .....	55
------------------------	----

C. Pembahasan .....	96
---------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
--------------------	-----

B. Saran.....	108
---------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP.....	4
Tabel 1.2 Masyarakat yang terkena dampak TPA.....	5
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	38
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai DKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	53
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana DKP Kota Bukittinggi .....	55
Tabel 4.3 Tim Penyuluhan Keliling DKP Kota Bukittinggi .....	58
Tabel 4.4 Uraian Data Timbulan Sampah yang dibuang ke TPA .....	61
Tabel 4.5 Tim Penyuluhan Kemasyarakatan dan Sekolah .....	80
Tabel 4.6 Tabel Kelurahan yang ikut serta dalam pengelolaan sampah .....	86

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi.....	52
Gambar 4.2 Sampah pasar yang dibuang dekat monumen Adipura .....	59
Gambar 4.3 Tempat pembuangan sampah yang tak resmi tanpa ada pemisahan sampah .....	76
Gambar 4.4 Hasil daur ulang sampah-sampah plastik .....	78
Gambar 4.5 Kelompok Dasawisma yang sedang mendaur ulang .....	82
Gambar 4.6 Tempat Pengelolaan Sampah Kompos .....	84
Gambar 4.7 Rumah tempat pemasaran hasil daur ulang sampah .....	91

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi. Di satu sisi, produksi sampah yang dihasilkan semakin meningkat, sementara di sisi lain lahan untuk pembuangan atau pengelolaan sampah sangat kurang memadai. Tidak bisa dipungkiri sampah kota yang dihasilkan setiap harinya membutuhkan perlakuan khusus. Jika dipandang sebelah mata, permasalahan sampah akan menjadi masalah besar yang dapat memicu konflik pada masyarakat. Artinya, harus ada standarisasi baku dalam pengelolaan sampah di suatu Kota.

Perhari Kota Bukittinggi biasa menghasilkan 350 meter kubik sampah dan 450 meter kubik pada hari libur, yang dapat diolah menjadi kompos baru sekitar 50 kilogram sehari pada rumah kompos di Talao, (El Fitra dalam ANTARA News : 10-05-2013). Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan TPA Panorama Baru sebagai sarana pengolahan sampah. TPA Panorama Baru mudah diakses karena tempat dan lokasinya yang cukup strategis. Namun setiap tahunnya volume sampah tersebut akan terjadi peningkatan seiring dengan penambahan penduduk. Sementara luas TPA Panorama baru yang hanya 1,5 Ha tidak akan lagi dapat menampung sampah yang akan bertambah setiap tahunnya.

Mengingat hingga saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dilihat dari peningkatan produksi sampah, yang tidak sebanding lagi dengan tempat pembuangan akhir sampah di Ngarai Panorama Baru. Wakil Walikota Bukittinggi Harma Zaldi kepada RRI Rabu (14/11/2012) siang menjelaskan “Untuk pengelolaan sampah, perlu ada kepastian hukum dalam memberikan pelayanan,

tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat, dan hal itu bertujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien, karena secara faktual prosesnya selama ini belum berjalan sesuai dengan kaedah lingkungan hidup, termasuk masih minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung,”

Bukittinggi sebagai kota pariwisata yang memiliki potensi unggulan daerah berangkat dari kondisi alam dan geografi Kota Bukittinggi itu sendiri, mengundang para pelancong baik dalam dan luar negeri, turis lokal maupun mancanegara, hanya untuk sekedar berkunjung maupun mencari nafkah di kota ini. Dengan banyaknya pelancong dan turis yang datang ke Bukittinggi, maka Pemerintah Kota Bukittinggi hendaklah menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan kota, tentunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan sangat berperan penting disini sebagai penyedia layanan dibidang kebersihan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi, yang merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang kebersihan dan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tatanan lingkungan yang bersih untuk masyarakat. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi memiliki tugas pokok dan fungsi, melaksanakan urusan pemerintah di bidang kebersihan dan pertamanan, yaitu dengan memberikan pelayanan penanganan sampah dari TPS sampai tempat pemrosesan akhir, fasilitasi /pembuatan/pemeliharaan taman kota, pelayanan limbah tinja serta pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kota bersih, tertib dan indah.

Penanggulangan masalah sampah sangat berhubungan erat dengan pengelolaan sampah yang baik, sampah haruslah diolah dan dikelola dengan baik,

seperti mendaur ulang menjadi pupuk atau barang-barang kerajinan rumah tangga. Maka tujuan dari penanggulangan sampah akan mudah dicapai dengan pengelolaan sampah yang benar disuatu daerah.

Secara umum, pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan cara konvensional dan cara modern. Cara konvensional masih menggunakan cara yang sangat sederhana, seperti diletakan begitu saja di sebuah lahan terbuka atau dibakar, sedangkan cara modern sudah melibatkan teknologi yang lebih baik.

Pengelolaan sampah di Bukittinggi dapat dikategorikan masih konvensional bahkan tergolong masih primitif. Diantara sistem yang digunakan yaitu *Open Dumping*. Sistem ini bekerja dengan meletakan sampah di lokasi pembuangan, selanjutnya para pemulung yang akan memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dengan yang tidak dapat didaur ulang dengan mekanisme tersendiri yang terpisah dari campur tangan pemerintah. *Open Dumping*, di berbagai kasus di Indonesia, baik di tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir sampah, tentunya akan merugikan masyarakat setempat yang harus menanggung segala resiko akibat dari sistem tersebut.

Sistem pengelolaan sampah secara *Open Dumping* menyebabkan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Panorama Baru semakin menumpuk, dikarenakan sampah yang bisa dikelola hanya 547,5 m<sup>3</sup> saja, sementara sisanya dibuang ke TPA. Hal ini dapat dilihat pada tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Bukittinggi Tahun 2012 di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2012**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Rasio Capaian
1.	Jumlah sampah RT yang sudah dikelola atau sampai ke TPA	75.920 m <sup>3</sup>	61.385 m <sup>3</sup>	14.535 m <sup>3</sup>
2.	Jumlah sampah pasar dan industri yang sudah dikelola atau sampai ke TPA	25.331 m <sup>3</sup>	21.920 m <sup>3</sup>	3.411 m <sup>3</sup>
3.	Jumlah sampah yang dikelola di pusat pengelolaan sampah organik	3.360 m <sup>3</sup>	547,5 m <sup>3</sup>	2.812,5 m <sup>3</sup>

*(Sumber: Renstra Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bukittinggi)*

Target sampah yang akan dikelola di pusat pengelolaan sampah diprediksi untuk tahun 2012 sebesar 3360 m<sup>3</sup> hanya tercapai 547.5 m<sup>3</sup> dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki (kendaraan, tempat pengolahan kompos). Hal ini menyebabkan volume sampah yang dibuang ke TPA menjadi bertambah karena terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga tahun 2012 sampah organik dibawa menggunakan betor yang volumenya 1.3 m<sup>3</sup>/betor, untuk menghindari tumpang tindih pemakaian kendaraan operasional di lapangan karena keterbatasan sarana dan prasarana pada DKP.

Dalam Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Departemen Kesehatan No. 281 thn 1989 yang menjadi syarat lokasi untuk TPA adalah tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, binatang pengerat bagi pemukiman terdekat (minimal 3 Km). Agar dapat terhindar dari resiko seperti pencemaran baik tanah, air, maupun udara yang menjadi efek negatif akibat penumpukan sampah yang jumlahnya setiap hari terus bertambah.

Seperti yang terjadi di daerah Panorama Baru beberapa waktu yang lalu yaitu pencemaran lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat sekitar, serta pada perubahan fungsi lahan. Hal ini dapat kita lihat dari tabel di bawah:

**Tabel 1.2**  
**Data Masyarakat Panorama Baru Yang Mengalami Penyakit Diare Dan Kulit Bulan Juni-November Tahun 2012**

No	BULAN	DIARE	Kulit (alergi,infeksi dan jamur)
1.	Juni	19	-
2.	Juli	13	11
3.	Agustus	12	14
4.	September	24	21
5.	Oktober	17	48
6.	November	16	18

(Sumber : *Puskesmas Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, 2012*)

Dari data di atas dapat dilihat ada beberapa orang masyarakat yang sakit gara-gara pencemaran air bersih dan lalat yang sering berterbangan ke rumah-rumah warga. Hal ini dikarenakan rumah-rumah warga dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah di Panorama Baru yang dijadikan sebagai tempat pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.

Kondisi ini seharusnya memacu berbagai pihak untuk turut memikirkan solusi dari penanggulangan sampah, khususnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengatur kebijakan di daerah dan dinas yang bersangkutan. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah sebenarnya masih sangat kurang. Padahal permasalahan sampah memiliki dampak dan ruang lingkup yang sangat luas terhadap lingkungan dan tata ruang juga aspek sosial ekonomi. Sehingga

diperlukan pemikiran, penanggulangan, pengelolaan dan pengaturan kebijakan sampah yang terintegrasi.

Pengelolaan sampah di Bukittinggi menjadi permasalahan tersendiri yang menarik untuk diteliti. Peristiwa menyebarnya penyakit diare dan penyakit kulit yang dikarenakan oleh pencemaran air bersih akibat sampah-sampah di TPA Panorama Baru ini menjadi sebuah permulaan konflik, seperti dijelaskan pada Undang-Undang 18/2008 pasal 11.d dan 11.e masyarakat sekitar mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu ada juga konflik dalam opini masyarakat untuk memindahkan lokasi TPA Panorama Baru ini, bahkan sampai pada masalah penyewaan tanah ulayat, hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang baik.

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya mencari solusi dan strategi apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah. Strategi juga dikenal dalam proses penyelenggaraan pembangunan, yang biasanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang dicapai suatu program pembangunan, sebagai akibat keterbatasan sumberdaya yang ada, dengan cara mengoptimalkan dan mengalokasikan secara tepat sumberdaya tersebut.

Sedangkan menurut Jack Plano (1985:254), strategi merupakan rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung dan tak langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh.

Menurut Bryson (2007:25) strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya. Oleh karena itu strategi dapat dikatakan sebagai perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya dalam pencapaian tujuannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan tentang respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Untuk sementara strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Payakumbuh, untuk memanfaatkan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) regional di Kota Payakumbuh "Rencana tersebut diupayakan terealisasi pada November 2012," kata Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi Maruf Amin, di Bukittinggi, (yang menjabat pada saat itu).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih jauh serta menfokuskan penelitian ini tentang bagaimana **“Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi”**.

## **B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah**

### **I. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan di daerah sekitar TPA Panorama Baru (pencemaran air bersih).
2. Terganggunya kesehatan masyarakat sekitar TPA (yang disebabkan oleh lalat dan tercemarnya air bersih).
3. Menyebarnya penyakit diare dan penyakit kulit yang dikarnakan oleh pencemaran air bersih akibat tumpukan sampah di TPA.
4. Adanya peningkatan volume produksi sampah perbulan, yang tidak sebanding lagi dengan luas TPA yang hanya 1,5 hektar.

### **II. Pembatasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan masalah, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu penelitian ini membahas tentang **“Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi”**.

### **III. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Bukittinggi?
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam strategi pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan ?

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi ?

### **C. Fokus Penelitian**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan dapat memfokuskan objek pembahasan, maka yang menjadi fokus adalah bagaimana Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi masalah sampah di Kota Bukittinggi terkait tentang pengelolaan sampah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi Masalah-Masalah Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Bukittinggi.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Menanggulangi Masalah Sampah di TPA Panorama Baru Kota Bukittinggi dikelompokan atas dua, yakni manfaat teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan kepustakaan yang relevan dengan mata kuliah antara lain Pemerintah daerah, kebijakan publik

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi khususnya tempat pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para aparatur pemerintah dalam membuat rancangan pengawasan serta dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pemecahan dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **A. Kajian Teoritis**

Untuk menganalisis masalah penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas konsep strategi, perumusan strategi, tingkat-tingkat strategi, dan jenis-jenis strategi yang berhubungan dengan penanggulangan masalah sampah oleh DKP. Untuk menjelaskan konsep-konsep ini, pada bagian ini mengacu kepada sejumlah literatur dan pendapat sejumlah ahli. Hal ini dapat mempermudah proses pemahaman terhadap hal yang akan diteliti oleh penulis. Dalam kajian kepustakaan ini akan dibahas tentang pengertian dan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan seperti yang diuraikan dibawah ini.

#### **1. Konsep Strategi**

Kata strategi berasal dari kata *stratega* dalam bahasa Yunani, gabungan *stratos* yang berarti tentara, dan *ego* yang berarti pemimpin. Dengan demikian strategi dimulai sebagai seni dari jendral (*The art of the general*) dan kini menjadi seni dari manajer umum (*the art of the general manager*). (Bryson, 2007:25)

Dari sudut etimologi (asal kata), penggunaan kata strategi dalam manajemen dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Menurut Plano (1985:254) strategi merupakan rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Plano membagi strategi menjadi dua pengertian strategi secara umum dan khusus adalah sebagai berikut:

- a. Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara/upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.
- b. Strategi secara khusus adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Lebih jauh menurut Plano, ada beberapa hal yang terdapat dalam strategi yaitu: 1) Suatu rencana yang sifatnya menyeluruh dan memiliki rentang waktu yang panjang, 2) Di dalam rencana tersebut mencakup serangkaian kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang diharapkan, 3) Tujuan yang menjadi sasaran dari serangkaian kegiatan yang dilakukan, 4) Sebuah rencana sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Sumarsono dalam bukunya *Manajemen Teori dan Praktek* (2003:193) strategi adalah rencana yang merupakan satu kesatuan bersifat luas dan terpadu yang menghadapkan keunggulan strategis terhadap tantangan - tantangan lingkungan.

Pada dasarnya hakekat pengertian strategi itu adalah penyesuaian institusi, organisasi / badan pemerintah terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Strategi merupakan terminologi yang digunakan luas oleh organisasi laba (profit oriented) yang kemudian dalam perkembangannya digunakan oleh organisasi nirlaba / organisasi publik lainnya, baik disektor birokrasi pemerintahan maupun oleh kalangan organisasi voluntir / lebih dikenal sebagai LSM (S. Tangkilisan 2004:11).

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, sebenarnya dapat dilihat persamaan pandangan dalam mendefinisikan strategi. Dan J. Salusu menawarkan definisi yang lebih sederhana, yaitu : strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.(J. Salusu, 1996:101)

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara atau taktik yang dilakukan dalam suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka panjang yang diinginkan dalam suatu kegiatan permasalahan yang dihadapi, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan untuk di masa depan untuk mencapai tujuan yang akan datang.

## **2. Fungsi Manajemen**

Pada hakikatnya manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas kebijakan umum yang telah dirumuskan. Terdapat dua klasifikasi utama dalam fungsi manajemen yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap. Fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak harus dijalankan dalam sebuah manajemen. Ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi ini akan mengakibatkan matinya organisasi. Sedangkan fungsi pelengkap adalah semua fungsi yang walaupun tidak mutlak dilaksanakan dalam organisasi namun pelaksanaannya akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta memperlancar usaha pencarian tujuan dengan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif (Siagian, 2003:5).

Menurut George Terry (2006: 288) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan defenisi di atas Terry menyampaikan ada empat fungsi manajemen, yaitu :

- a. Perencanaan (*Planning*) yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian (*Organization*) yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.
- c. Pengarahan (*Actuating/Directing*) yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.

Hakikatnya dari fungsi manajemen yang disampaikan oleh Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan dapat diatasi (Siagian, 2003:85).

### **3. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. (Hariadi, 2005).

Sedangkan menurut S. Tangkilisan (2004:35) ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai strategi / tujuan yang hendak dicapai organisasi dalam mencapai / meraih visi dan misi yang diemban suatu organisasi dan melaksanakan mandat yang dibebankan kepada organisasi tersebut, yaitu :

- 1) Membuat kebijakan / program baru yang mendukung misi organisasi tersebut. Dalam penelitian ini akan dilihat program-program yang telah dan akan dirancang Dinas Kebersihan Dan Pertamanan dalam menanggulangi masalah sampah terkait pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi.
- 2) Memilih pendekatan-pendekatan yang efektif dalam meraih misi tersebut. Maksudnya dalam penelitian ini akan dilihat pendekatan-pendekatan yang digunakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan guna mencapai misi menciptakan Kota Bukittinggi yang Bersih, Sehat, Rapi dan Indah..
- 3) Mensinergikan seluruh sumber daya / lembaga-lembaga yang mendukung dalam mencapai misi organisasi tersebut. Begitu juga dengan langkah ini, maksudnya yakni bagaimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengerahkan semua sumber daya dan mengkoordinasikan pegawai-pegawainya terkait dalam pencapaian visi-misi lembaga.
- 4) Membuat suatu peraturan-peraturan yang legal dalam menunjang tercapainya misi tersebut.

#### **4. Teori analisa kendala strategi**

Dalam melaksanakan peraturan-peraturan legal sebagai suatu langkah terkadang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga diperlukan strategi dalam pelaksanaan peraturan-peraturan legal tersebut. Menurut Bryson (2007:35) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu strategi ataupun pelaksanaan sebuah strategi, yaitu:

- a. Faktor lingkungan eksternal, yaitu semua kondisi, kecenderungan dan pengaruh dari luar institusi yang menentukan keberhasilan pengembangan visi institusi. Semua faktor ini harus diperhitungkan karena dapat menjadi ancaman bagi institusi / sebaliknya menjadi peluang.
- b. Faktor lingkungan internal, yaitu semua kondisi yang berasal dari dalam organisasi yang dapat menjadikan kekuatan dan sebaliknya kelemahan. Adapun kondisi itu dapat berupa faktor sumber daya yang terdiri dari manusia, ekonomi, informasi dan kemampuan faktor strategi yang disiapkan secara menyeluruh / secara bagian / fungsional. Dan faktor pelaksana yang berupa hasil (output) dan sejarah.

#### **5. Teori analisa upaya mengatasi kendala strategi**

Untuk dapat menjalankan suatu strategi juga sangat diperlukan pendekatan-pendekatan terhadap strategi tersebut yang dapat membantu tercapainya misi organisasi, menurut Bryson (2007:67) diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan langsung (*direct approach*) yaitu pendekatan yang akan bekerja dengan sangat baik pada sebagian besar lembaga pemerintah dan lembaga publik. Pendekatan langsung merupakan yang terbaik ketika tidak ada kesepakatan tentang sasaran dan walaupun ada, kesepakatan tentang

sasaran tersebut terlalu abstrak untuk digunakan. Pendekatan ini dapat digunakan pada lingkungan yang pluralistik, partisan, terpolitisasi dan relatif terfragmentasi sebagian besar organisasi publik.

- b. Pendekatan sasaran (*goals Approach*) yaitu pendekatan yang lebih sejalan dengan teori perencanaan konvensional, yang menetapkan bahwa institusi / organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan kemudian mengembangkan strategi untuk pencapaiannya. Pendekatan ini lebih mungkin bekerja dalam organisasi publik / non profit.
- c. Pendekatan visi keberhasilan (*vision of succes approach*) yaitu pendekatan yang mengembangkan suatu gambaran yang terbaik atau ideal mengenai institusi atau organisasi di waktu yang akan datang sebagai organisasi yang sangat berhasil memenuhi misinya. Pendekatan visi keberhasilan menjadi sangat berguna jika organisasi kesulitan mengidentifikasi isu-isu strategis secara langsung; jika tidak ada kesepakatan sasaran dan tujuan yang terperinci dan spesifik serta akan kesulitan mengembangkan strategi, dan jika perubahan drastis mungkin pendekatan ini diperlukan.

## **6. Tingkat-tingkat Strategi**

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) dalam J. Salusu, (1996:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy*.

- a. Enterprise Strategy.

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok

yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. Corporate Strategy.

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik

dan perencanaan, stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. Business Strategy.

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

- 1) Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.
- 3) Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi (J. Salusu, 104:1996).

## **B. Pengertian Sampah.**

### **1. Sampah.**

Secara umum masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia. Pengertian sampah secara khusus dikemukakan oleh Azwar A. (1979:54) sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis karena (human waste) tidak termasuk didalamnya.

Sedangkan menurut Mochtar M. (1987:55) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Berdasarkan rumusan pengertian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah semua jenis benda atau barang bangunan/kotoran manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pengotoran terhadap air, tanah dan udara sehingga dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan hidup manusia.

## 2. Penggolongan Sampah.

Penggolongan sampah sangat penting diketahui untuk mengetahui macam-macam sampah dan sifatnya sebagai dasar penanganan dan pemanfaatan sampah. Seperti yang dijelaskan oleh Hadiwiyoto (1983:23) dalam bukunya yang berjudul Penanganan dan Pemanfaatan sampah, menjelaskan bahwa penggolongan sampah dapat didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu :

- a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya.
- b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya.
- c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya.
- d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya.
- e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya.
- f. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan kriteria di atas sampah dapat digolongkan menurut asalnya, yaitu;

- a. Pasar, tempat-tempat komersil.
- b. Pabrik-pabrik atau industri.
- c. Rumah tinggal kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum, dan lain-lain serta pekarangannya.
- d. Kadang hewan atau pemotongan hewan.
- e. Jalan, lapangan dan pertamanan
- f. Sekolah, riol dan septik tank.
- g. Dan lain sebagainya.

Sedangkan pembagian atau penggolongan sampah menurut sumbernya adalah :

- 1) Sampah domestik, sampah ini berasal dari lingkungan pemukiman atau perumahan ;
- 2) Sampah komersil, sampah yang dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, restoran, rumah makan, warung, pasar dan swalayan ;
- 3) Sampah industri, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri ;
- 4) Sampah alami dan lainnya, dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan sebagainya.

Berdasarkan sifatnya sampah dapat digolongkan menjadi:

- a. Sampah yang mudah membusuk ;
- b. Sampah yang tidak mudah membusuk ;
- c. Sampah yang mudah terbakar ;
- d. Sampah yang tidak mudah terbakar

### **3. Pengelolaan Sampah.**

Sedangkan pengelolaan sampah menurut Kuncoro (2009:24) adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Cara pengelolaan sampah sangat beragam, tergantung pihak yang menanganinya dan pihak-pihak tersebut memiliki teknik penanganan yang berbeda-beda.

Tipe pengelolaan sampah.

Pada dasarnya terdapat 2 macam pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan / penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan permukiman atau kota.

Penanganan setempat adalah penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh sipenghasil sampah. Sedangkan pengelolaan secara terpusat, khususnya dalam teknis operasional, adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoodinir.

Jika yang akan dilaksanakan adalah sistem penanganan yang terpusat, maka adanya suatu institusi yang menangani langsung pengelolaan persampahan mutlak diperlukan. Institusi dalam sistem pengelolaan persampahan memegang peranan yang sangat penting meliputi, status, struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi vertikal maupun horisontal dari badan pengelola.

Sesuai dengan status kota, untuk kota metropolitan dan kota besar, bentuk badan pengelola sebaiknya suatu "Dinas" tersendiri dan selanjutnya dikembangkan menjadi bentuk Perusahaan Daerah. Kotamadya sebaiknya merupakan Dinas tersendiri sedangkan Kota Administratif sebaiknya merupakan Suku Dinas Kebersihan atau UPTD dibawah Dinas Kebersihan atau Dinas PU Kabupaten. Ibu Kota Kabupaten sebaiknya merupakan UPTD dibawah Dinas PU/Dinas Kebersihan Kabupaten atau Seksi dibawah Dinas PU Kabupaten.

#### **4. Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat**

Dalam pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban

pendanaan pemerintah serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah. (Sudradjat, R. 18:2006).

Makna dari 3R ini adalah sebagai berikut :

- a. *Reduce* ( mengurangi ) : Meminimalisasi barang/ material yang kita gunakan.
- b. *Reuse* ( memakai kembali ) : Hindari pemakaian barang sekali pakai (disposable).
- c. *Recycle* ( mendaur ulang ) : Sebisa mungkin, mendaur ulang barang yang tidak berguna lagi dan beralih fungsi menjadi barang lain.

Pengelolaan Sampah secara 3R adalah pengolahan sampah yang berbasiskan pada masyarakat dengan menggunakan tiga kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, yaitu :

- 1) Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat.
- 2) Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R.
- 3) Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R.

Maka dari 3 kegiatan yang dicakup dalam 3R diharapkan dapat membantu terlaksananya pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat di setiap Kota/Kabupaten. Proses pelaksanaan Tempat Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat harus melakukan beberapa tahapan, yang terdiri dari 6 tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a) Tahap pertama (Persiapan dan Perencanaan)
- b) Tahap Kedua Seleksi Fasilitator
- c) Tahap Ketiga Seleksi Lokasi

- d) Tahap Keempat Penyiapan masyarakat, Survey lapangan, dan Penyusunan RKM (Rencana Kerja Masyarakat).
- e) Tahap Kelima Pelaksanaan Tempat Pengelolaan Sampah 3R.
- f) Tahap Keenam Keberlanjutan program.

Dari 6 tahapan di atas diharapkan strategi tempat pengelolaan sampah ini dapat terlaksana dengan baik, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk mengurangi volume sampah di Kota Bukittinggi dengan mengurangi sampah dari asal sampah itu sendiri. (Sudradjat, R. 52:2006).

### **5. Pengelolaan Sampah Perkotaan**

Dalam pengelolaan persampahan terutama untuk daerah perkotaan, harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis.

Teknik operasional.

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir yang bersifat terpadu. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan yaitu ;

- a. Rencana penggunaan lahan.
- b. Kepadatan dan penyebaran penduduk.
- c. Karakteristik lingkungan fisik, biologi dan sosial ekonomi.
- d. Kebiasaan masyarakat.
- e. Karakteristik sampah.
- f. Peraturan-peraturan/aspek legal nasional dan daerah setempat.
- g. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
- h. Lokasi pembuangan akhir.
- i. Biaya yang tersedia.

- j. Rencana tata ruang dan pengembangan kota.
- k. Iklim dan musim. (SK SNI 1990:3)

Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir.

### **C. Tempat Pembuangan Akhir Sampah.**

Untuk menangani masalah sampah di Kota, pada dasarnya sudah terdapat standarisasi untuk masalah tersebut, hanya saja terkadang pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan konsep yang telah disepakatati. Dan sangat tidak memerhatikan lingkungan sekitar. Sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem, bahkan dapat menyebabkan banjir yang diakibatkan oleh tersumbatnya aliran irigasi atau drenase.

Pada dasarnya sistem pengolahan sampah perkotaan memiliki sub-sub sistem dalam proses penampungan sampah-sampah tersebut. Salah satu sub sistemnya adalah pemisahan antara sampah organik dengan yang non-organik, pemilahan sampah kering dengan sampah basah, penggunaan wadah sampah seperti *poly bag*. Selain itu ada juga sub sistem yang digunakan dengan pengolahan secara individu dengan menggunakan berbagai macam cara, seperti membakar, dijadikan kompos dan dikubur. Sub sistem yang cukup baku adalah sampah dikumpulkan dalam wadah pengumpulan sampah lalu di buang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang banya terdapat di jalan-jalan kota. Dan untuk selanjutnya petugas Dinas Kebersihan dan pertamanan (DKP) yang

akan membawa sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara yang bermacam-macam pula, seperti diangkut oleh truk DKP untuk diproses di TPA atau dengan bentor (becak bermotor).

Pengolahan sampah yang terakhir adalah di TPA, pengolahan tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti open dumping, sanitasi landfill, controlled landfill, modified landfill, improved landfill, reklamasi, pemadatan sampah, daur ulang, penggunaan cacing, dan harmonisasi antara pemulung dengan sapi (hewan ini biasa digunakan untuk memadatkan sampah dan memakan sampah yang berasal dari sampah organik berupa sayuran dan sisa makanan manusia). (Kamarudin, 1999:251)

Jadi Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) adalah pos akhir, atau tempat berkumpulnya semua sampah-sampah masyarakat yang ada pada suatu Kota, yang didalamnya terjadi berbagai proses untuk mengolah sampah sehingga disinilah awal munculnya masalah pencemaran lingkungan, apabila tidak dikelola atau diolah secara baik sampah-sampah yang ada di TPA tersebut akan menjadi sumber penyakit, yang akan menyebar kelingkungan masyarakat.

Secara pelaksanaan terdapat peraturan yang juga perlu dijadikan acuan yaitu Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 281 tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah yaitu :

1. Pengolahan sampah yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang mendasar.
2. Masyarakat perlu dilindungi dari kemungkinan gangguan kesehatan akibat pengelolaan sampah sejak awal hingga tempat pembuangan akhir.

Dalam lampiran Keputusan Dirjen tersebut dijelaskan pula persyaratan kesehatan pengelolaan sampah untuk Pembuangan Akhir Sampah yang dinyatakan antara lain :

Lokasi untuk TPA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, binatang pengerat bagi pemukiman terdekat (minimal 3 Km).
- b. Tidak merupakan pencemaran bagi sumber air baku untuk minum dan jarak sedikitnya 200 m dan perlu memerhatikan struktur geologi setempat.
- c. Tidak terletak pada daerah banjir.
- d. Tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi.
- e. Tidak merupakan sumber bau, kecelakaan serta memperhatikan aspek estetika.
- f. Jarak dari bandara tidak kurang dari 5 Km.

Pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Diupayakan agar lalat, nyamuk, tikus, kecoa tidak berkembang biak dan tidak menimbulkan bau.
- b. Memiliki drainase yang baik dan lancar.
- c. Leachate harus diamankan sehingga tidak menimbulkan masalah pencemaran.
- d. TPA yang digunakan untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, lokasinya harus diberi tanda khusus dan tercatat di Kantor Pemda.
- e. Dalam hal tertentu jika populasi lalat melebihi 20 ekor per blok gril atau tikus terlihat pada siang hari atau nyamuk Aedes, maka harus dilakukan pemberantasan dan perbaikan cara-cara pengelolaan sampah.

#### **D. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.**

Berdasarkan pembahasan strategi pada halaman sebelumnya maka Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah suatu perencanaan program kegiatan yang terkordinir, rapi dan teratur guna mencapai tujuan dalam penanggulangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan Pemerintah Kota yang bersangkutan, karena dinas kebersihan dan pertamanan sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah kota guna melaksanakan program kegiatan yang akan dilakukan.

##### **1. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi.**

Selanjutnya berhubungan dengan penelitian ini saya dapat melihat beberapa Strategi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi dalam menanggapi masalah-masalah sampah di Kota Bukittinggi yang beberapa waktu kemarin sempat menjadi masalah besar yang dihadapi pemerintah daerah bukittinggi. Dari masalah pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pengelolaan sampah di TPA, sampai ke masalah tanah ulayat yg digunakan untuk TPA. Yang sempat membuat masyarakat memblokade truk pengangkut sampah agar tidak membuang sampah di TPA Panorama Baru lagi.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi;

1. Menutup sampah dengan terpal saat mengangkut sampah dari TPS ke TPA.
2. Menambah armada pengangkut sampah, (truk sampah, becak bermotor, gerobak, dan TPS)

3. Penambah armada pasukan kuning.
4. Mebuat Bank Sampah.
5. Pelaksanaan tempat pengelolaan sampah 3R.
6. Meberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Strategi Pengelolaan Sampah merupakan suatu cara atau taktik yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam suatu perencanaan jangka panjang, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang ada selama ini. Strategi pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan tehnologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Pada hakikatnya pada timbunan sampah itu kadang-kadang masih mengandung komponen-komponen yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi namun karena tercampur secara acak maka nilai ekonominya hilang dan bahkan sebaliknya malah menimbulkan bencana yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi memiliki langkah-langkah atau kebijakan pengelolaan sampah yaitu:

*Pertama, Jangka Pendek.*

- 1) Mengoptimalkan gerakan pemilahan sampah ditingkat rumah tangga dan sekoah-sekolah dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Penyuluhan kepada kelompok masyarakat di Kelurahan-kelurahan dalam Kota Bukittinggi.

- b) Pembentukan fasilitator dan kader lingkungan di tingkat Kelurahan.
  - c) Melaksanakan penyuluhan pengelolaan sampah pada sekolah-sekolah.
  - d) Melaksanakan penyuluhan keliling secara rutin.
- 2) Mengoptimalkan pelayanan persampahan pada masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penambahan lokasi-lokasi kerja penyapuan.
  - b) Menambah frekwensi penyapuan di lokasi-lokasi tertentu.
  - c) Melengkapi dan membenahi sarana dan prasarana persampahan.
  - d) Memperluas pelayanan pengangkutan sampah.

*Kedua, Jangka Menengah.*

- 1) Pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) di masing-masing Kecamatan.
- 2) Membuat gerakan 3R berbasis masyarakat di tingkat RT.
- 3) Penataan dan pendataan ulang potensi-potensi redistribusi persampahan.
- 4) Pembangunan SPA (Stasiun Peralihan Antara)

*Ketiga, Jangka Panjang.*

- 1) Pembuatan transfer Depo sampah dalam rangka pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA.
- 2) Pembangunan TPST di masing-masing Kelurahan.
- 3) Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja)
- 4) Pembangunan TPA yang terdekat dengan Kota Bukittinggi melalui kerjasama dengan kabupaten Agam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat langkah yang akan dilakukan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan Strategi Pengelolaan Sampah baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Plano (1985:254) yaitu strategi merupakan rencana yang menyeluruh atau berjangka panjang yang mencakup serangkaian gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. Sampah adalah masalah yang umum dialami oleh setiap daerah. Hal ini memerlukan penanganan yang khusus. Dan dengan strategi-strategi di atas diharapkan permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bukittinggi dapat ditanggulangi oleh dinas yang bersangkutan.

#### **E. Kerangka Konseptual.**

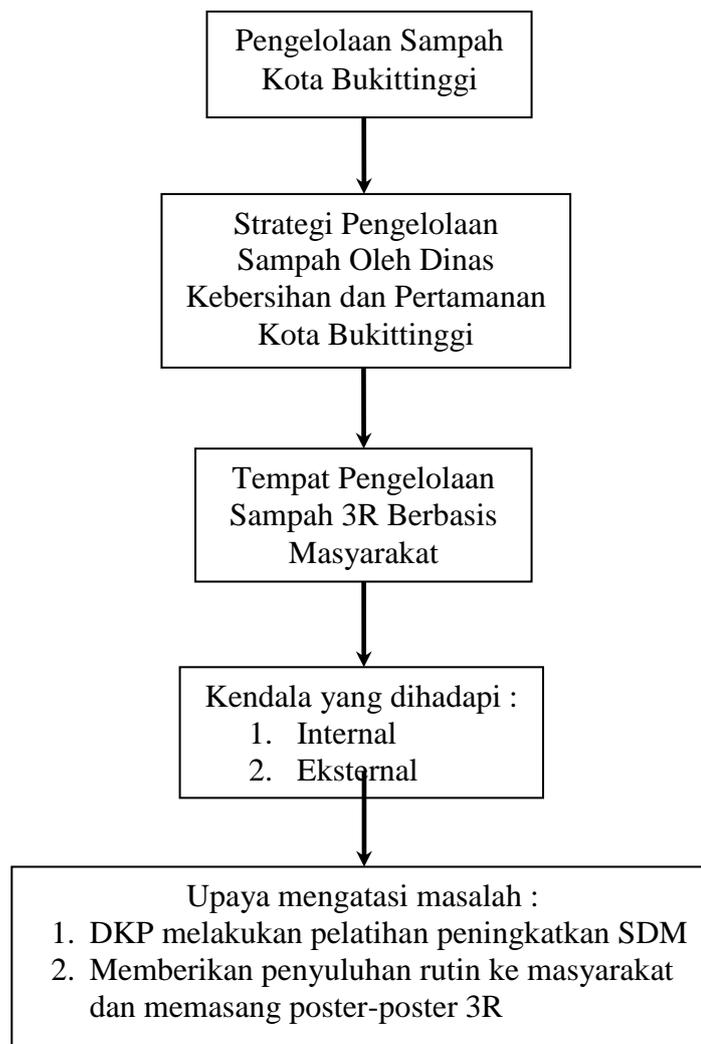
Sampah sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Sejak manusia dilahirkan akan memproduksi sampah sebagai sisa kegiatan atau aktifitas kehidupannya. Pada dasarnya apa yang dilakukan manusia adalah memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari lingkungan, serta mengembalikan hasil aktifitas berupa buangan (sampah) kembali ke lingkungan. Apabila sampah tidak tertangani dengan baik selain merusak keindahan dan menimbulkan pencemaran lingkungan juga dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Volume sampah yang terus meningkat akan menghadapi pada permasalahan kebutuhan lahan pembuangan sampah.

Dalam pelayanan kebersihan Pemerintahan Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi. Yang diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan peraturan penjabar pelaksanaan pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan sampah, seperti dengan adanya penambahan armada Truk sampah, Becak motor sampah, membuat Bank Sampah dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya permasalahan sampah dikota Bukittinggi tidak kunjung terselesaikan. Hal ini terlihat dengan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan, komplek perumahan, pasar-pasar dan tempat umum lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kenyamanan bahkan dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Maka untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bukittinggi yang lebih baik, baik melalui program-program pemerintah atau pendekatan terhadap masyarakat.

Konseptual penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan berikut:

**Gambar 2.1**  
**(Kerangka Konseptual)**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi merupakan suatu teknik, kegiatan dan rencana yang terstruktur dan menyeluruh dengan menggunakan kecakapan serta sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berbasiskan masyarakat dalam waktu yang ditentukan. Dalam menjalankan strategi pengelolaan sampah DKP melakukannya dengan membuat suatu program yang tujuannya menyeluruh, dengan melaksanakan program Tempat Pengelolaan Sampah 3R berbasis masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan masih terdapat kendala.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Bukittinggi dengan kegiatan Tempat Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat terbagi atas dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah : (1) kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan antara unit pelaksana kegiatan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, maupun antara fasilitator kegiatan dengan kelompok Dasawisma/unit pelaksana kegiatan; (2) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk memasarkan produk hasil daur ulang sampah dari pemerintah. Sedangkan Faktor

eksternal yaitu : (1) rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat ini.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta pemerintah setempat dalam menghadapi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan strategi pengelolaan sampah dengan kegiatan tempat pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat ini adalah : (1) Terhadap kendala internal yaitu : Terkait dengan kurangnya koordinasi, DKP mengatasi kendala ini dengan melakukan pendekatan sasaran, yaitu petugas telah melakukan semacam pertemuan serta rapat-rapat antar pegawai dan pelaksana kegiatan untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan maupun segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing petugas serta tujuan strategi. terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana untuk pemasaran DKP serta Kelurahan telah membantu dalam memasarkan hasil daur ulang sampah ini. (2) Terhadap kendala eksternal yaitu : Terkait dengan minat masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah, DKP beserta fasilitator mengatasinya dengan melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, melalui penyuluhan keliling rutin ke kelurahan-kelurahan.

#### **B. Saran.**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kelancaran strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Supaya strategi pengelolaan sampah dapat berjalan dengan optimal diharapkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi

agar dapat meningkatkan koordinasi, komitmen dan kerja sama antar pihak-pihak yang terlibat dalam strategi pengelolaan sampah agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Serta diharapkan dapat melakukan peningkatan kemampuan penguasaan kerja bagi staf pengelola dan terutama pada tenaga kebersihan, seperti mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan.

2. Untuk lebih mengoptimalkan langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi tempat pengelolaan sampah 3R, Dinas Kebersihan dan Pertamanan hendaklah lebih berupaya lagi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan harus melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin tentang Pengelolaan persampahan/kebersihan pada masyarakat, dengan mengikutsertakan aparat kecamatan, kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama terhadap anak-anak yaitu melalui proses pendidikan tentang kebersihan yang diberikan melalui penyuluhan dan pelatihan langsung ke seluruh sekolah-sekolah di Kota Bukittinggi baik negeri ataupun swasta.
3. Agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara optimal, maka diharapkan pemerintah dapat memperkuat regulasi atau landasan hukum yang dapat memberikan legitimasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat di Kota Bukittinggi. Setiap organisasi publik khususnya organisasi pemerintahan atau sering disebut birokrasi pasti membutuhkan regulasi atau landasan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sampai saat ini belum adanya Peraturan Daerah turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukittinggi. Belum ada peraturan yang kuat dalam pengelolaan sampah mendasari belum maksimalnya penerapan pengelolaan sampah di Kota ini. Berjalannya proses perumusan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi diharapkan dapat mendukung penerapan tempat pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Azwar A. , *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Mutiara.1979.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Dewi, T Qurnia. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2008.
- Grant, M Robert. *Analisis Strategi Komtemporer; Konsep, Teknik, Aplikasi*. Jakarta: Erlangga. 1999.
- Hadiwiyoto, Soewedo. *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta : PT Inti Idayu Press. 1983.
- Jhon. M. Bryson, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Manik, Kaden.E.S. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Djembatan
- Mochtar M. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP. 1987.
- Nogi, Hessel Tangkilisan. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset dan yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. 2003.
- Plano, Jack, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali. 1985.
- Salusu, J. *Pengambilan keputusan stratejik untuk organisasi publik dan organisasi nonprofit*. Jakarta: Grasindo. 1996.
- Sejati, Kuncoro. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Siagian, Sondang, P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003.
- Soetrisno L. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1995.
- Solihin, A. Wahab. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Sudradjat, R. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta : Penebar Swadaya. 2006.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2006.

Sugandhy, Aca. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Terry, George. R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Penerjemah Smith. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

#### **Peraturan :**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, *Rencana Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi tahun 2011-2015*, Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, *Kajian Pemanfaatan TPA Regional Tahun 2014*, Pemerintah Kota Bukittinggi.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2008. *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006 *tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*.

Peraturan Walikota Bukittinggi No. 13 Tahun 2010. *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Kota Bukittinggi Tahun 2011-2015.

Peraturan Walikota Bukittinggi No. 13 Tahun 2009. *Tentang Topoksi Eselon II dan III Serta Rincian Tugas Eselon IV* pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

Peraturan Walikota Bukittinggi No.47 Tahun 2009. *Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi*, tgl 28 September 2009.

Undang-Undang, No 18 Tahun 2008. *Tentang Pengelolaan Sampah*.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. *Tentang Kesehatan*.

#### **Artikel / Jurnal :**

Suryaningsih. 2011. *Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kota Semarang*. Artikel. Universitas Diponegoro.

Mohamad Rizal. 2011. *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan*. Jurnal. SMARTek.

Arianto. W, Darwin T.J. *Penanganan Sampah Perkotaan Terpadu*.  
Artikel. Universitas Diponegoro.

Dwijayanti M. *Upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya*. Skripsi Sarjana, Ilmu Administrasi Negara FISIP UNAIR, Surabaya.

**Website :**

<http://www.antaraneews.com/berita/309945/bukittinggi-target-tidak-buang-sampah-ke-ngarai-2013>, diakses tgl 10-05-2013

<http://rri.co.id/mobile/index.php/detailberita/detail/35659>, tgl diakses 21-04-2013

<http://news.liputan6.com/read/147477/warga-memblokade-tpa-sampah-bukittinggi>, tgl diakses 10-05-2013